MELALUI OPTIMALISASI TPPS KAPANEWON

Pemkab Sleman Serius Kejar Target 'Zero Stunting'

SLEMAN (KR) - Prevalensi stunting Sleman tahun 2022 berdasarkan SSGI mengalami penurunan sebesar 1,9 % menjadi 6,88 persen. Meskipun demikian, masih ada beberapa kasus yang harus ditangani.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman Kustini saat melakukan monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kapanewon Sleman di Kantor Kapanewon Sleman, Senin (17/7). Bupati didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa yang sekaligus menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melakukan monitoring sebagai upaya menekan angka stunting di Kabupaten Sleman.

Bupati mengimbau TPPS untuk selalu bersinergi dan memberikan edukasi dan informasi tentang pentingnya penanggulangan stunting kepada masyarakat Kapanewon Sleman. "TPPS Kapanewon tentunya lebih memahami karakteristik masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, TPPS perlu melakukan pendekatan komunikasi yang tepat kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui agar dapat mencegah kemunculan kasus baru dan mendukung percepatan penurunan stunting," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Danang Maharsa berharap monitoring dan evaluasi dapat mengetahui berbagai kendala, permasalahan maupun hambatan dalam upaya menurunkan stunting di Kabupaten Sleman. "Tujuan monev kinerja TPPS di Kapanewon adalah agar program berjalan baik dan tepat sasaran. Tujuannya tentu penuruan prevalensi stunting di Sleman dengan target jangka panjang Sleman *Zero Stunting*," jelasnya.

Danang menambahkan, pola asuh dan pola makan anak sangat berpengaruh. Mengingat kedua hal tersebut dapat berpengaruh pada kebutuhan gizi anak yang tercukupi. **(Has)**

KR-Istimewa

Bupati, Wakil Bupati dan seluruh pemangku kepentingan bertekad tuntaskan kasus stunting di Sleman.

PENGURUS TINGKAT KAPANEWON DILANTIK

Prabukusumo Sebut PMI Sleman Luar Biasa

KR-Istimewa

Ketua PMI Sleman Sunartono melantik pengurus PMI Kapanewon.

SLEMAN (KR) - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman melaksanakan pelantikan pengurus PMI tingkat Kapanewon Masa Bakti 2023-2028 di Aula Pangripta Bappeda Sleman, Senin (17/7). Pelantikan 119 pengurus dilakukan Ketua PMI Sleman Sunartono, disaksikan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa bersama Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo.

Danang berharap agar amanah yang dipercayakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Pengurus PMI Kapanewon Se-Kabupaten Sleman yang telah dilantik dituntut untuk mampu menyusun program dan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan perkembangan situasi untuk memajukan organisasi dan melayani masyarakat di Kapanewon masing-masing.

"Pengurus PMI Kapanewon harus mampu merealisasikan pelayanan prima bagi anggota dan masyarakat. Dengan orientasi pelayanan ini diharapkan PMI Kapanewon dapat menjadi organisasi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ujarnya

Menurut Danang, momentum pelantikan ini merupakan awal yang baik bagi pengurus, untuk lebih meningkatkan layanan berkualitas kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah Indonesia. "Jadilah PMI yang tanggap, cepat dan peduli, serta mari kita bersama memajukan Kabupaten Sleman yang lebih baik, dan mengabdi kepada masyarakat dengan berlandaskan rasa kemanusiaan," tandasnya.

Sementara Ketua PMI DIY GBPH Prabukusumo mengapresiasi kinerja kepengurusan PMI Kapanewon dan Kabupaten Sleman yang telah selesai masa baktinya dan berharap untuk kepengurusan baru bisa lebih baik dan ditingkatkan kinerjanya.

"Sleman ini menurut saya luar biasa dan bagus kepengurusannya, salah satu yang terbaik. Diharapkan bisa berdedikasi tinggi dan berkomitmen untuk dapat melaksanakan tugas sesuai mandat sesuai prinsip dasar palang merah internasional. Diharapkan berdedikasi tinggi dan berkomitmen dan dapat melaksanakan tugas sesuai mandat. Kepengurusan terpilih mampu melaksanakan prinsip dasar PMI," pesan Prabukusumo.**(Has)-d**

TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN

Pemkab Lakukan Pemutakhiran Data

SLEMAN (KR) - Sebagai persiapan program pemutakhiran data kemiskinan di Kabupaten Sleman, Pemkab Sleman melalui Dinas Sosial mengadakan sosialisasi petunjuk teknis Musyawarah Padukuhan (Musduk) dan Musyawarah Kalurahan (Muskal) di Aula Nakula Dinas Sosial Sleman, Senin (17/7). Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Sleman yang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman, Danang Maharsa.

Menurut Kepala Dinas Sosial Sleman Mustadi, sosialisasi ini dilakukan kepada perwakilan 86 kalurahan terkait pelaksanaan Musduk dan Muskal untuk pemutakhiran data kemiskinan.

"Untuk mencapai kualitas data yang akurat, pelaksanaan musyawarah nantinya harus melibatkan berbagai unsur yang ada di lingkungan masing-masing. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan bisa mendapatkan kualitas data yang baik," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Danang Maharsa menyebut, upaya pemutakhiran data kemiskinan sangat penting untuk efektivitas sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Sehingga diharapkan partisipasi dan peran aktif semua pemangku wilayah dalam melaksanakan Musduk dan Muskal guna meng-update data kemiskinan di Kabupaten Sleman.

"Diharapkan 1.212 padukuhan dan 86 kalurahan semuanya melaksanakan Musduk/Muskal sesuai petunjuk teknisnya. Selain itu pengumpulan hasil Musduk dan Muskal sesuai jadwal yang ditentukan," ujar Danang. **(Has)-d**

KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa memberi arahan pada pemutakhiran data kemiskinan.

PERINGATI HARGANAS DAN HARI KOPERASI

Keluarga Berperan Bentuk Generasi Berkualitas

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman selenggarakan upacara bendera memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30, Hari Koperasi Nasional ke-76 dan Hari Anak Nasional ke-39 di Lapangan Pemda Sleman, Senin (17/7). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sleman beserta sejumlah perwakilan setiap OPD di lingkungan Pemkab Sleman dengan Inspektur Upacara Wakil Bupati Danang Maharsa.

Menurut Danang, peringatan Harganas merupakan momen untuk lebih menyadari dan memahami pentingnya keluarga sebagai pondasi membangun kehidupan yang sejahtera. Keluarga merupakan rujukan pertama untuk melindungi, membimbing dan memberdayakan anggota keluarga baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Untuk itu, peran keluarga perlu didorong untuk dapat dioptimalkan sebagai wadah pembentuk generasi berkualitas.

"Upaya mewujudkan keluarga sejahtera tentunya lekat dengan upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Pada bulan Juli ini juga diperingati sebagai Hari Anak ini saya ingin mengingatkan seluruh pihak untuk dapat bersinergi memenuhi hak-hak anak," ucap Danang.

Sementara terkait Peringatan Hari Koperasi Nasional, Danang mengajak seluruh aparat Pemkab Sleman untuk kembali menguatkan koperasi agar tetap adaptif dan berkembang di era modern ini. "Seluruh aparat Pemkab Sleman untuk kembali memanfaatkan berbagai produk dan jasa koperasi dalam memenuhi kebutuhannya," pungkasnya. **(Has)-d**

BPJS Kesehatan Beri Penghargaan Stakeholder

KR-Istimewa

Pemberian penghargaan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sleman kepada perwakilan stakeholder.

SLEMAN (KR) - BPJS Kesehatan Cabang Sleman memberikan penghargaan kepada stakeholder. Ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-55 BPJS. Ada 17 stakeholder yang menerima penghargaan. Antara lain Dinkes Sleman, Dinkes Kulonprogo, IDI Cabang Sleman, PDGI Cabang Sleman dan yang lain. Penghargaan diberikan di Gedung Olahraga Tridadi Sleman.

Di saat yang bersamaan juga diadakan senam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diikuti 300 lansia. "Apresiasi tertinggi kami berikan kepada seluruh pemerintah daerah, fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama, organisasi profesi, asosiasi, badan usaha serta seluruh stakeholder dan kepada Duta BPJS Kesehatan, sehingga BPJS Kesehatan dapat tumbuh dan berkembang sebesar ini," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman M Idar Aries Munandar, Senin (17/7).

Nandar menambahkan, tantangan utama organisasi ini bukan lagi pada kondisi finansial. Tetapi bagaimana kinerja BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan bermutu yang dapat dirasakan oleh peserta secara nyata menjadi penentu keberlangsungan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN. "BPJS Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi mutu layanan, melalui beragam inovasi untuk meningkatkan kemudahan akses, kecepatan pelayanan dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan yang merata hingga ke seluruh wilayah di Indonesia," jelasnya.

Pada kegiatan yang sama, ada perwakilan stakeholder membacakan janji layanan jaminan kesehatan nasional yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ini merupakan komitmen dari fasilitas kesehatan untuk mendukung transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara kepada peserta JKN, salah satunya dengan menerima NIK untuk pendaftaran pelayanan dan tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. **(Awh)-d**